

Evaluasi Kebijakan dan Strategi Resolusi Di Kepulauan Bangka

Septian Abdillah Harys

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Jawa Barat

Email: sptianharys@gmail.com

Abstrak

Aktivitas penambangan timah ilegal di Kepulauan Bangka telah bergeser dari sekadar isu ekonomi atau lingkungan menjadi tantangan serius bagi keamanan nasional Indonesia, memicu konflik sosial baik horizontal maupun vertikal yang mengancam stabilitas regional. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam menangani penambangan ilegal sebagai bentuk evaluasi kebijakan; (2) mengidentifikasi implikasi konflik dan upaya resolusi yang telah dilakukan; dan (3) mengevaluasi tindakan-tindakan tersebut dalam rangka mendukung keamanan nasional. Dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif Eksploratif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen di wilayah-wilayah utama penambangan ilegal di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah. Kerangka resolusi konflik (Susskind, 1994) dan konsep Keamanan Nasional (Slawotsky, 2024) digunakan sebagai lensa analitis untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka normatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dengan realitas lapangan. Hasil yang diharapkan adalah perumusan strategi resolusi konflik yang aplikatif, transparan, partisipatif, dan didasarkan pada keadilan ekologis guna memulihkan kontrol negara yang efektif dan memperkuat stabilitas keamanan nasional.

Keywords: Evaluasi kebijakan, Keamanan nasional, Kepulauan Bangka, Konflik tambang ilegal, Strategi resolusi

PENDAHULUAN

Isu-isu keamanan nasional saat ini menjadi isu yang cukup krusial karena melibatkan beragam aktor, dinamika teknologi, serta penyebaran berita palsu yang tersebar luas (Mağat & Parlak, 2025). Dalam konteks sipil, keamanan nasional mengacu pada perlindungan kedaulatan suatu negara, integritas teritorial, dan kesejahteraan warganya dari ancaman internal dan eksternal. Sektor energi dan pertambangan merupakan bagian integral dari pembangunan industri negara dan pusat kesejahteraan publik, sehingga mengamankan infrastruktur ini sangat penting bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional (Enokie, 2025).

Indonesia, sebagai negara produsen timah terbesar ke-3 di dunia, memiliki lokasi utama penambangan di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung, yang berkontribusi sebesar 90% dari hasil produksi timah nasional. Meskipun potensi timah ini membawa dampak positif, aktivitas penambangan—khususnya yang ilegal dan tidak berizin—telah memunculkan berbagai permasalahan kompleks. Aktivitas penambangan ilegal yang berlangsung tanpa regulasi dan pengawasan ketat telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius (Segui *et al.*, 2023), serta menyebabkan kerugian material dan korban jiwa.

Selain dampak lingkungan, penambangan ilegal juga kerap kali menimbulkan konflik kepentingan, perselisihan antar kelompok masyarakat, dan eksploitasi tenaga kerja. Akumulasi ketegangan ini dapat meluas menjadi gejolak sosial yang mengganggu ketertiban umum

dan mengancam stabilitas keamanan dalam cakupan yang lebih luas. Dengan demikian, problematika penambangan timah ilegal di Kepulauan Bangka telah menjadi bagian dari tantangan serius bagi keamanan nasional Indonesia.

Secara normatif, konflik sosial akibat penambangan timah ilegal seharusnya ditangani melalui tiga tahapan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial: pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik. Namun, penyelesaian konflik yang efektif menuntut pendekatan informal, partisipatif, dan kolaboratif yang melibatkan banyak pihak (Susskind, 1994).

Penulis menemukan bahwa sedikit sekali penelitian yang pernah mengkaji mengenai resolusi konflik pada penambangan timah ilegal secara spesifik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menunjukkan adanya celah pada kajian ketahanan sosial nasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjembatani realitas konflik sosial yang kompleks di tingkat lokal dengan ketentuan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam dinamika konflik yang terjadi akibat aktivitas penambangan timah ilegal. Penelitian dilaksanakan di Kepulauan Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, difokuskan pada wilayah sentra aktivitas tambang timah ilegal, seperti di Kabupaten Bangka dan Bangka Tengah.

Subjek dipilih melalui metode purposive sampling, mencakup penambang timah ilegal, aparat keamanan, pejabat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat dan pemuka adat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi (peraturan daerah, laporan pemerintah, arsip media).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis kewenangan pemerintah daerah dalam penanganan tambang timah ilegal

Kewenangan pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan konflik yang bersumber dari sektor pertambangan, khususnya pasca-revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba), berada dalam posisi dilematis yang secara langsung memengaruhi stabilitas Keamanan Nasional di tingkat lokal. Idealnya, Pemda, berdasarkan mandat UU No. 7 Tahun 2012, memiliki tanggung jawab utama dalam fase Pencegahan Konflik Sosial, yang meliputi pemetaan potensi konflik, dialog multi-pihak, dan perumusan kebijakan yang berbasis kearifan lokal. Namun, realitasnya menunjukkan adanya konflik kewenangan struktural.

Penarikan kewenangan perizinan pertambangan, termasuk pengawasan hulu, ke ranah pemerintah pusat menciptakan kekosongan kontrol bagi Pemda terhadap kegiatan yang berdampak langsung di wilayahnya. Analisis studi Haryadi et al. (2023) menyoroti bagaimana "idealisme ekologis" Pemda untuk menjaga lingkungan dan sosial masyarakat sering kali bertentangan dengan realitas hukum yang menempatkan Pemda hanya sebagai pihak

yang menanggung dampak negatif (kerusakan lingkungan, instabilitas sosial), tanpa memiliki kuasa penuh untuk menghentikan izin atau mengatur tata ruang pertambangan secara komprehensif.

Celah kebijakan (*policy gap*) ini memicu respons Pemda yang bersifat ad-hoc dan reaktif. Hasil temuan lapangan mengindikasikan bahwa Pemda di Kepulauan Bangka cenderung fokus pada kebijakan responsif jangka pendek, seperti penertiban mendadak dan pembentukan satuan tugas gabungan, alih-alih melaksanakan strategi pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Kewenangan Pemda dalam pencegahan konflik menjadi tumpul karena tiga faktor utama:

1. Keterbatasan sumber daya fiskal

Pemda sering kali tidak memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, edukasi hukum pertambangan, dan penyiapan mata pencaharian alternatif pasca-tambang yang bersifat jangka panjang.

2. krisis legitimasi dan kontrol negara

Ketiadaan kontrol atas legalitas pertambangan itu sendiri (yang berada di Pusat) membuat setiap tindakan penertiban Pemda dianggap masyarakat sebagai tindakan inkonsisten atau setengah hati. Kondisi ini menciptakan narasi krisis legitimasi dan kontrol negara (Zulqarnain & Riza, 2024), yang membuka ruang bagi aktor ilegal dan backing untuk beroperasi.

3. Politik lokal dan ekonomi ilegal

Jaringan tambang ilegal seringkali terintegrasi dengan struktur ekonomi lokal

dan, dalam beberapa kasus, struktur politik. Ketika Pemda hanya mampu melakukan penertiban fisik tanpa menawarkan solusi mata pencaharian alternatif yang layak bagi ribuan penambang kecil, hal itu hanya akan memindahkan lokasi konflik dan menunda eskalasi, bukan meresolusinya, sehingga ancaman terhadap stabilitas keamanan daerah terus berulang dan berputar.

Dengan demikian, evaluasi awal menunjukkan bahwa Pemda telah bertindak dalam koridor UU 7/2012 di fase Penghentian, namun secara struktural gagal dalam fase Pencegahan karena ketidakselarasan antara kewenangan dan tanggung jawab.

2. Implikasi konflik dan bentuk resolusi yang telah dilakukan

Konflik akibat tambang timah ilegal di Kepulauan Bangka telah meluas dari sekadar isu lingkungan menjadi ancaman kompleks yang menjangkau dimensi Keamanan Non-Tradisional (Kitler, 2021). Implikasi utama yang teridentifikasi, selain kerugian negara dari sisi penerimaan pajak, meliputi:

a. Implikasi keamanan lingkungan (ekologis)

Aktivitas pertambangan timah ilegal, baik di darat maupun di laut, menimbulkan kerusakan ekosistem yang masif. Data menunjukkan bahwa penambangan ilegal telah merusak ekosistem laut, terumbu karang, dan padang lamun (Adi et al., 2024), serta mengubah properti fisikokimia tanah yang membuatnya tidak subur untuk pertanian (Wulandari et al., 2022). Kerusakan ini adalah ancaman lingkungan yang berimplikasi langsung pada Keamanan Pangan dan Keamanan Kesehatan lokal,

karena kontaminasi air dan hilangnya sumber daya hayati laut (Gurisha et al., 2024). Ketika lingkungan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat hancur, ini memicu migrasi paksa dan persaingan ketat atas sumber daya yang tersisa, yang merupakan bahan bakar bagi konflik sosial.

b. Implikasi instabilitas sosial (komunal)

Instabilitas sosial muncul dari berbagai lapisan. Secara horizontal, terjadi perselisihan antar kelompok masyarakat: antara penambang (yang mungkin merupakan pendatang) dan masyarakat lokal yang bergantung pada sektor perikanan atau pariwisata; atau antara penambang kecil dan kelompok yang memiliki backing politik/aparat. Secara vertikal, ketegangan terjadi antara masyarakat dengan aparat/negara. Kozińska & Górniak-Zimroz (2021) menunjukkan bahwa kegiatan ilegal, karena sifatnya yang tersembunyi, seringkali melibatkan jaringan pelindung yang kuat, yang menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum. Hal ini memperparah masalah Ketahanan Sosial di wilayah Bangka.

c. Bentuk Resolusi yang Dilakukan dan Evaluasi Efektivitasnya

Bentuk resolusi konflik yang dominan di Bangka adalah pendekatan Penghentian Konflik (UU 7/2012), melalui penegakan hukum represif, penyitaan alat berat, dan penangkapan. Meskipun pendekatan ini penting, evaluasinya menunjukkan kegagalan dalam mencapai solusi berkelanjutan karena:

1. Solusi yang diberikan tidak pernah menjawab akar masalah, yaitu tingginya permintaan pasar timah global yang

memicu harga tinggi, kemiskinan struktural, dan kurangnya akses ke lapangan kerja formal yang menjanjikan (Qasaye, 2023). Selama insentif ekonomi ilegal lebih besar, represi hanya menjadi biaya operasional yang harus ditanggung penambang.

2. Upaya resolusi jarang menggunakan model Resolusi Konflik Partisipatif (Susskind, 1994). Model ini menekankan pada perlunya negosiasi berbasis kepentingan (interest-based negotiation) antarpihak (penambang, Pemda, tokoh adat, perusahaan legal, aktivis). Ketiadaan forum dialog yang transparan dan inklusif menyebabkan penambang merasa diabaikan, dan Pemda dicurigai. Padahal, resolusi konflik yang berkelanjutan menuntut proses yang memuaskan semua pihak (Saaïda, 2023).
3. Evaluasi tindakan penanganan dalam mendukung keamanan nasional. Mengacu pada konsep Keamanan Nasional (Slawotsky, 2024), efektivitas penanganan tambang timah ilegal di Bangka harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk melindungi kedaulatan sumber daya, menjamin kesejahteraan rakyat, dan menegakkan hukum domestik. Evaluasi menyeluruh menunjukkan bahwa tindakan penanganan saat ini belum optimal dan justru kontraproduktif dalam jangka panjang terhadap dukungan Keamanan Nasional karena persistensi aktivitas tambang ilegal yang melibatkan aktor dan jaringan yang terorganisasi menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mampu mengendalikan sumber dayanya, sebuah

prasyarat fundamental kedaulatan dan Keamanan Nasional (Wu, 2025; Putri et al., 2024). Kelemahan ini membuka kerentanan pertahanan dan keamanan non-militer. Keamanan Nasional bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga tentang penguatan institusi domestik dan penegakan hukum yang adil. Kegagalan menindak backer atau jaringan ilegal yang lebih besar, dan hanya menindak penambang kecil, merusak kepercayaan publik dan menciptakan siklus konflik yang tidak pernah berakhir.

KESIMPULAN

Masalah tambang timah ilegal adalah isu Keamanan Nasional karena mengancam seluruh spektrum keamanan non-militer—lingkungan, ekonomi, dan sosial. Solusinya harus kompleks dan terintegrasi, sejalan dengan pandangan bahwa masalah Keamanan Nasional modern memerlukan kolaborasi antar-aktor (Kitler, 2021). Dengan mengadopsi Strategi Resolusi Komprehensif yang berbasis pada dialog, keadilan ekologis, dan penegakan hukum yang tuntas, kasus tambang timah ilegal dapat diubah dari ancaman internal yang persisten menjadi peluang untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) yang telah memberikan dukungan akademik, fasilitas terbaik, serta lingkungan penelitian yang sangat kondusif. Tidak lupa kepada seluruh

pihak lain, baik itu instansi daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga komunitas di lapangan yang telah bersedia berbagi cerita dan data dengan hati terbuka, sungguh, kontribusi tulus dari semua pihak ini sangat menentukan dalam upaya kami merumuskan strategi yang lebih baik demi Keamanan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, W., Hartoko, A., Purnomo, P. W., Supratman, O., Pringgienies, D., & Hernawan, U. E. (2024). Ecological condition of seagrass meadows around sea-based tin mining activities in the waters of Bangka Belitung Islands, Indonesia. *Marine Pollution Bulletin*, 209. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2024.117151>
- Gurisha, M. S., Makoba, A. A., Kiyengo, H. E., & Rao, P. V. K. (2024). Determination of Natural Radioactivity Levels and Radiation Hazards from the Soil of Tin Mining in Kyerwa District, Tanzania. *Physical Science International Journal*, 28(4), 119–129. <https://doi.org/10.9734/psij/2024/v28i4842>
- Haryadi, D., Ibrahim, I., & Darwance, D. (2023). Ecological Idealism in the Regulation of Tin Mining in Bangka Belitung: Reasoning About Crucial Articles. *Journal of Sustainability Science and Management*, 18(9), 17–37. <https://doi.org/10.46754/jssm.2023.09.003>
- Hassan, O. (2025). Aviation Security within the context of National Security in Nigeria: A Critical Assessment. *OSF Preprints*. https://doi.org/10.31235/osf.io/92rqj_v1
- Kitler, W. (2021). National security: theory and practice (Issue April). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas.

- Kozińska, P., & Górniak-Zimroz, J. (2021). A review of methods in the field of detecting illegal open-pit mining activities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 942(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/942/1/012027>
- Mağat, M., & Parlak, B. (2025). Analysis of National Security Advisory System in True Communication of National Security Issues. *International Journal of Politics and Security*, 7(1), 54–66. <https://doi.org/10.53451/ijps.1531732>
- Putri, G. P. R. L., Velynanda, P., Ayu, R. P., Sinaga, S. T., Salampessy, S. S. I., & Vanesia, T. (2024). Zero Emission an Analysis of Illegal Mining As a Non-Procedural Exploitation of the Law. *Problematika Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.33021/ph.v9i1.5198>
- Qasaye, O. A. M. (2023). Conflict Resolution and Peacebuilding in International Development. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 12(12), 333–338. <https://doi.org/10.21275/sr231203104158>
- Saaida, M. (2023). Conflict Resolution Applications to Peace Studies. *Qeios*, 1–12. <https://doi.org/10.32388/tgc4d5>
- Slawotsky, J. (2024). Conceptualizing National Security in an Era of Great Power Rivalry: Implications for International Economic Law. *East Asia*, 42(3), 279–307. <https://doi.org/10.1007/s12140-024-09434-y>
- Susskind, L. (1994). *Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreements*. Oxford University Press.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331).
- Wu, C. (2025). Redefining concepts of nation and national security and establishing their models for the new era. *Journal of Safety and Sustainability*, 2(1), 45–58. <https://doi.org/10.1016/j.jsasus.2024.12.002>
- Wulandari, D., Agus, C., Rosita, R., Mansur, I., & Fikri Maulana, A. (2022). Impact of Tin Mining on Soil Physio-Chemical Properties in Bangka, Indonesia. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 14(2), 114–121. <https://doi.org/10.20885/jstl.vol14.iss2.art2>
- Zulqarnain, & Riza, F. (2024). Analysis of Coal Mining Legal Instruments and the Powerlessness of the State in Restricting Natural Destruction Activities by Corporations. *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Syiah Kuala.